

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 2, Nomor 2, Januari - Juni 2010

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang

Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Sunaryo

Redaktur Pelaksana

Muhamad Wahyuni Nafis • Abdul Hakim

Dewan Redaksi

Abdul Hakim • Budhy Munawar-Rachman •

Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer • Moh. Monib •

Muhamad Wahyuni Nafis • Sunaryo •

Yudi Latif • Zainun Kamal

Pewajah Sampul

Taqi Kanara

Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

Titik-Temu terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan mana pun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman kuarto dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 2, Nomor 2, Januari - Juni 2010

DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Cuplikan dari Wirid Ibn 'Arabi	5-6
Kaidah Emas	7
Pengantar	9-13

SAJIAN KHUSUS

Simbol dan Simbolisme Keagamaan Populer serta Pemaknaannya dalam Perkembangan Sosial-Politik Nasional Kontemporer <i>Nurcholish Madjid</i>	17-59
Politik Kesalehan Nurcholish Madjid: Dari Kritik ke Apresiasi <i>Kusmana</i>	61-82
Belajar Kembali Membaca Tanda <i>Andy Setiawan</i>	83-88

ARTIKEL

Revolusi Spiritualitas: Sebuah Upaya Memperbaiki Diri dan Bangsa <i>Soetrisno Bachir</i>	91-97
--	-------

Kritik Nalar Kebangkitan Islam <i>M. Dawam Rahardjo</i>	99-114
Membangun Jembatan Mistikal untuk Dialog Antaragama: Sebuah Catatan untuk <i>When Mystic Masters Meet</i> <i>Kautsar Azhari Noer</i>	115-140
Pluralisme Agama dalam Perspektif Sufi <i>Muhammad Qorib</i>	141-168
Kesadaran dalam Hidup Sehari-hari <i>Sogyal Rinpoche</i>	169-171

RESENSI BUKU

Ketika Feminisme Bernegosiasi dengan Budaya Populer <i>Neneng Nurjanah</i>	175-178
Mencari Terobosan Baru dalam Shalat <i>Ikhsan Ramazani</i>	179-183

MAKLUMAT

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	187-188
Ucapan Terima Kasih	189
Pembetulan	190
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	191

KRITIK NALAR KEBANGKITAN ISLAM

M. Dawam Rahardjo

Kebangkitan bangsa-bangsa Muslim sebenarnya baru mulai terjadi hampir secara serentak sejak tahun 1945. Kebangkitan itu dipelopori oleh dan ketika Indonesia mencapai kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Ini diikuti dengan kemerdekaan berbagai negara dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa lain. Kebangkitan secara parsial telah terjadi di Mesir ketika negeri ini dijajah Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Bentuk kebangkitan itu adalah proses modernisasi terutama di bidang pembangunan kekuatan militer dan administrasi pemerintahan modernis di bawah kepemimpinan Mohammad Ali. Untuk mencapai kemerdekaan, Mesir masih mengalami berbagai pemberontakan. Tapi modernisasi ini juga telah membangkitkan gerakan pendidikan modern mengikuti model Eropa Barat yang berpengaruh di Indonesia dengan berdirinya Muhammadiyah. Selain di Mesir, di Turki di bawah kepemimpinan Kemal Attaturk telah terjadi juga sebuah kebangkitan model Turki yang mengikuti sekularisme yang didahului dengan penghapusan sistem khilafah Utsmani. Tapi peristiwa ini tidak dianggap sebagai kebangkitan Islam, justru keruntuhan dunia Islam di pusat dunia Islam pada waktu itu. Itulah sebabnya di Mesir timbul reaksi berupa munculnya gerakan untuk menghidupkan kembali khilafah Islam yang berpusat di Mesir. Sekalipun gagasan ini didukung oleh tokoh pembaharu semacam Muhammad Rasyid Ridla, namun secara konsepsional ditentang oleh Ali Abdul Raziq, salah seorang ulama Al-Azhar yang justru mendukung gagasan sekularisme.

Dalam praktek kenegaraan, sebenarnya Mesir sendiri juga mengikuti sekularisme. Oleh karena itu, Bung Karno menyebut dua model sekularisme, yaitu sekularisme Turki yang tidak memiliki empati terhadap agama, dan sekularisme Mesir yang bersikap empati terhadap agama dan mendukung pembentukan otoritas keagamaan seperti dewan ulama Al-Azhar – walaupun otoritas ini tidak masuk ke dalam sistem kenegaraan karena Al-Azhar adalah lembaga swasta. Di Indonesia, sekularisme Turki yang diungkapkan oleh Bung Karno sebagai model kebangkitan bangsa Muslim ditolak keras oleh dua ulama dan cendekiawan Muslim, Ustadz A. Hasan dan Mohammad Natsir. Dalam perkembangannya kemudian, Indonesia cenderung mengikuti model Mesir, malah hubungan antara agama dan negara jauh lebih mendalam, sebagaimana tercermin dalam pembentukan Departemen Agama, Pengadilan Agama yang merupakan lembaga resmi, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan lembaga setengah resmi yang dibiayai oleh negara.

Sejak 1945, dunia Islam secara serentak telah memasuki tahap baru perkembangannya. Berdasarkan pengalaman Indonesia, sebagaimana pernah dikemukakan oleh Ruslan Abdulgani, ada tiga tahap yang harus ditempuh oleh negara-negara seperti Indonesia. Pertama, melakukan *state building* atau pembinaan negara, berikut sistem politik yang sekuler dan demokratis. Tapi negara-negara Islam pada umumnya tidak memiliki teoritis-teoritis berpengaruh seperti Prof. Supomo, Ir. Sukarno, Dr. Moh. Hatta, Syahrir atau Muhammad Yamin yang dimiliki oleh Indonesia. Walaupun tokoh-tokoh itu telah meletakkan dasar tentang teori negara yang demokratis dan liberal, namun pelaksanaannya ternyata tidak berjalan mulus karena masih adanya pertentangan ideologis antara kaum nasionalis, Islamis dan Marxis. Bung Karno tidak berhasil menyatukan ketiga golongan itu dalam suatu negara demokrasi, terutama pertentangan yang tidak kenal kompromi antara golongan Marxis dan Islamis. Golongan Marxis, karena kesalahan besarnya berkonfrontasi dengan militer, akhirnya dibubarkan. Bubarnya Partai Komunis Indonesia ini membuka peluang bagi golongan Islamis untuk memperjuangkan gagasan negara agama (teokrasi) dengan menerapkan syariat Islam

sebagai hukum positif – walaupun perjuangan itu ditentang oleh mayoritas, termasuk kalangan umat Islam sendiri. Tidak terselesaikannya masalah ideologis ini membuat umat Islam terhambat melakukan pembangunan ekonomi dan peradaban, bahkan umat Islam menjadi kelompok penentang modernisasi. Bahkan di bidang politik, gerakan Islam mengalami marginalisasi berkesinambungan, padahal sebenarnya partai-partai Islam dapat berperan penting dalam demokrasi sebagaimana pernah ditunjukkan oleh Partai Masyumi pada tahun 1940-an dan 1950-an, di mana tokoh-tokoh Islam mampu menduduki pucuk pimpinan kenegaraan dan posisi strategis seperti Perdana Menteri atau Gubernur Bank Sentral.

Kedua, pembangunan negara (*state building*) ini perlu diikuti atau sekaligus dibarengi oleh pembangunan bangsa (*nation-building*). Inti pembangunan bangsa ini adalah mencapai integrasi di segala bidang seperti politik, budaya, masyarakat dan ekonomi untuk mencapai persatuan bangsa yang kokoh, tapi tanpa paksaan oleh negara. Dengan pengertian yang lebih populer kontemporer, inti pembangunan bangsa adalah mengembangkan *civil society* yang independen dari intervensi negara. Pembangunan *civil society* ini penting karena merupakan infrastruktur bagi kehidupan demokrasi-politik. Pembangunan *civil society* ini hanya dimungkinkan jika menganut tiga prinsip. *Pertama*, prinsip sekularisme yang memisahkan otoritas agama dari otoritas negara guna mencegah absolutisme Abad Pertengahan yang berlaku di Dunia Kristen maupun Islam. Dalam prinsip ini, otoritas agama bukan merupakan sumber hukum karena yang merupakan sumber hukum adalah rakyat. *Kedua*, prinsip pluralisme yang menghargai perbedaan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dialog dan interaksi antara golongan masyarakat akan menimbulkan kesaling-percayaan (*mutual trust*) dan akhirnya persatuan yang sejati dan dinamis. Pluralisme ini juga dimaksudkan untuk menghindari konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan, karena segalanya dipecahkan melalui dialog yang terbuka dan jujur. *Ketiga*, prinsip liberalisme dan masyarakat terbuka (*open society*). Liberalisme ini memungkinkan terjadinya perkembangan pemikiran dan pengetahuan yang menghindari phobia terhadap

pemikiran dari luar. Sekalipun tiga prinsip itu merupakan solusi terhadap krisis yang dialami oleh dunia Islam pada waktu ini, namun tragisnya tiga prinsip itu justru ditolak di dunia Islam, termasuk di Indonesia dengan keluarnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan tiga prinsip itu untuk dianut. Dengan demikian, pembentukan *civil society* merupakan persoalan berat dan mendasar. Jika umat Islam tidak mengambil sikap terbuka terhadap tiga prinsip itu, maka gerakan Islam akan terus menerus mengalami krisis.

Tahap ketiga yang harus ditempuh adalah pembangunan karakter (*character building*). Untuk membangun sebuah peradaban besar dan melewati krisis, sebuah bangsa harus menyemai nilai-nilai positif yang terkandung di dalam masyarakatnya, tanpa mengabaikan nilai-nilai positif yang mungkin datang dari luar. Dalam konteks Indonesia, apa yang sudah dilakukan oleh para pendiri bangsa Indonesia dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara merupakan upaya untuk mengembangkan nilai-nilai luhur yang dimiliki bangsa ini. Semangat yang terkandung di dalam Pancasila seperti prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial adalah nilai yang dapat menuntun masyarakat Indonesia menuju peradaban besar. Dalam merumuskan nilai-nilai yang harus dijadikan dasar, para pendiri bangsa Indonesia juga sangat terbuka dengan nilai-nilai positif yang datang dari luar. Sikap keterbukaan ini sangat penting agar bangsa Indonesia tidak menjadi eksklusif (memiliki anggapan bahwa segala sesuatu yang datang dari luar adalah buruk). Mengenai pentingnya sikap keterbukaan, hingga kini, dunia Islam tampaknya masih terjebak dalam merespons nilai-nilai positif yang datang dari luar.

Di lain pihak, dunia telah menunjukkan bahwa China dan India telah mengalami kebangkitan sebagai bangsa besar yang disegani oleh dunia, terutama di bidang ekonomi, dan diramalkan akan menjadi raksasa ekonomi baru menandingi Jepang, Eropa dan Amerika Serikat setelah membuka dirinya terhadap dunia luar. Sementara dunia Islam masih berada dalam ketertutupan. Bahkan Hizbut Tahrir, umpamanya, sangat gencar melakukan upaya purifikasi terutama dari pengaruh Barat, karena gagasan-gagasan Barat dianggap bukan merupakan bagian dari Islam. Mereka menginginkan kembali

ke zaman Salafiyah, masa ketika dunia Islam belum mengalami Hellenisasi. Tapi ketertutupan itu tidak bisa dipertahankan, karena dalam sejarahnya, Islam pernah mengalami ekspansi ke dunia yang lebih luas dan menjumpai peradaban-peradaban besar lain ternyata lebih maju di berbagai bidang. Setelah menyerap pengaruh luar itulah dunia Islam mengalami kemajuan peradaban yang sangat pesat dan akhirnya mencapai puncak peradaban dunia. Tapi dalam perkembangannya kemudian, dunia Islam melakukan pemurnian juga yang dipelopori oleh al-Ghazali yang menolak wacana filsafat. Lagi-lagi, dunia Islam mengalami kemunduran. Sebaliknya, Dunia Barat yang menerima dan menyerap Averoisisme mengalami renaissans, pencerahan, dan reformasi menuju kebangkitan peradaban modern. Tapi tragisnya, berbagai pengalaman sejarah itu tidak diambil hikmahnya oleh umat Islam. Malahan gerakan Islam bergerak mundur ke sebelum pra Abad Pertengahan.

Dunia Islam dewasa ini diidentifikasi oleh para pengamat sebagai kebangkitan revivalisme. Di sini ada dua makna kebangkitan. *Pertama*, kebangkitan sebuah peradaban baru di masa modern. *Kedua*, menghidupkan kembali masa lampau, masa Khulafa' Rasyidun, misalnya, atau masa Salafi, yakni generasi awal ketika peradaban Islam yang baru tumbuh itu masih belum dipengaruhi oleh peradaban lain, khususnya Yunani. Kebangkitan dalam arti pertama itulah yang dimaksud dalam kebangkitan abad 14 Hijriyah. Tapi kebangkitan ini tidak terjadi, paling tidak hanya parsial saja dan penuh dengan kegamangan. Sedangkan kebangkitan dalam arti kedua adalah revivalisme yang dikemukakan oleh John Naisbitt dan Peter Berger, yang tak lain adalah kebangkitan fundamentalisme agama yang sebenarnya terjadi juga pada agama-agama lain. Ini justru menimbulkan kerisauan karena disertai dengan konflik tindak kekerasan dan terorisme.

Sementara itu, peradaban-peradaban Asia lain justru sudah mengalami kebangkitan, yaitu peradaban China dan India, yang diawali dengan kebangkitan ekonomi. Kedua negara berpenduduk terbesar di dunia itu diramalkan akan menjadi raksasa ekonomi baru paling tidak pada tahun 2020, menandingi Eropa dan Amerika

Utara. Mereka telah mengembangkan pendidikan dan Iptek. Gejala itu ditandai dengan keunggulan di bidang pendidikan dan temuan-temuan teknologi baru. Hal ini mengingatkan kita pada kebangkitan renaissance Eropa yang mengawali masa pencerahan. Tapi kedua bangsa ini merasa telah mengalami pencerahan setelah menjadi negara merdeka dari penjajahan dan dalam kasus China setelah mengalami revolusi multi-dimensi yang diikuti dengan pemberantasan kemiskinan yang juga merupakan belenggu itu.

Sebenarnya secara parsial, Islam telah mengalami kebangkitan. Pertama, OIC dibentuk pada tahun 1960-an, yang berpusat di Jeddah, di mana Indonesia dan banyak negara sekuler, seperti Turki, Aljazair, Siria, dan Mesir, menjadi anggotanya. Kedua, IDB didirikan, yang pendanaannya didukung oleh negara-negara petrodolar. Dan ketiga, berkembangnya lembaga-lembaga keuangan non-ribawi menjadi ciri utama sistem ekonomi Islam. Ketiga lembaga ini hingga kini terus berlanjut dan menjaga eksistensi dunia Islam. Namun, Islam sendiri sebagai peradaban yang didukung oleh agama dan ilmu pengetahuan serta teknologi, tidak berkembang sebagaimana diharapkan. Ada beberapa faktor yang perlu dipikirkan sebagai penyebabnya. *Pertama*, perasaan serba cukup (*self sufficient*) karena kepercayaan bahwa ajaran Islam itu telah lengkap dan sempurna, sehingga merasa tidak membutuhkan pengetahuan dari luar, sebagaimana dicerminkan oleh pandangan Hizbut Tahrir. *Kedua*, ketertutupan dunia Islam yang takut kemasukan pengaruh dari luar terutama dari Barat. *Ketiga*, ketidak-beranian menggunakan akal merdeka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan terbelenggu semata-mata dengan teks wahyu, sehingga tidak timbul pemikiran yang kritis, kreatif dan baru. Dengan perkataan lain, umat Islam terbelenggu dalam kejumudan atau kejahilan, tidak pernah merasa dewasa dan tidak bersikap tegar dalam berinteraksi dengan dunia luar, karena umat Islam tidak punya kesanggupan untuk mengakui keunggulan pihak luar, walaupun jelas-jelas lebih maju dan memimpin arah perkembangan dunia. Tapi diam-diam umat Islam belajar juga ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar, tetapi tidak punya etos untuk mengembangkannya sendiri.

Jika orang seperti Naisbitt atau Berger melihat kebangkitan Islam, tetapi gejala itu bersifat sporadis dan tersebar di beberapa negara dan dalam beragam pola. Negara-negara yang nampak aktif dalam gerakan Islam antara lain Iran, Mesir, Aljazair, Turki, Sudan, dan Pakistan. Di Turki dan Aljazair, kebangkitan Islam yang sebenarnya relatif sukses menempuh jalan demokrasi, telah dibendung oleh kaum militer yang sekuler. Di Mesir, Sudan dan Pakistan gerakan Islam tetap berada dalam kendali kaum militer. Di Malaysia dan Indonesia, partai Islam masih bisa bertahan tetapi dalam posisi minoritas dan marjinal, namun relatif berhasil merayap di bidang ekonomi. Melalui jalur ekonomi inilah nampak harapan kebangkitan Islam, walaupun tidak terlalu formal dan spektakuler, sehingga tidak nampak sebagai gejala kebangkitan.

Negara yang paling memiliki kemungkinan menerapkan syariat Islam secara penuh hanyalah Saudi Arabia dan Iran, masing-masing mewakili aliran Sunni dan Syi'ah. Tapi keduanya lebih bersifat bersaing daripada bekerjasama. Di Saudi Arabia, aliran Syi'ah dibendung sepenuhnya sebagai aliran terlarang. Sedangkan di Iran, aliran Syi'ah berposisi dominan tanpa melarang aliran Sunni, bahkan ada usaha-usaha untuk mengintegrasikan kedua aliran itu di Iran, tetapi tetap dalam pimpinan aliran Syi'ah. Mestinya, kedua negara itu dapat menjadi model paling ideal dari suatu negara Islam. Namun Iran nampak lebih demokratis dan republikan daripada Saudi Arabia. Negara Padang Pasir ini masih merupakan negara absolutis yang bertentangan dengan perkembangan dunia modern. Sedangkan Iran, walaupun dapat dijadikan contoh sebuah negara Islam yang relatif demokratis, tetapi tidak ditopang oleh landasan hak-hak sipil yang luas. Bahkan, ia bukan negara demokrasi yang pluralis sehingga tidak bisa dijadikan contoh yang dapat diikuti, apalagi oleh kaum Syi'ah sendiri, karena kedudukan kaum Syi'ah yang homogen dan monolitik di Iran. Karena itu, maka Republik Islam Iran juga tidak bisa dijadikan model bagi negara-negara lain di dunia Islam.

Di negeri-negeri Islam lain, agama Islam bisa saja punya pengaruh dominan sebagai agama, bahkan Islam bisa ditetapkan sebagai agama resmi negara, misalnya di Malaysia. Namun,

elite politiknya tidak memiliki komitmen untuk menerapkan syariat sebagai hukum positif. Negara-negara itu pada umumnya menerapkan sistem hukum Barat atau hukum adat. Ini menunjukkan bahwa penerapan syariat Islam secara konsekuen tidak bisa dipaksakan sekalipun dalam masyarakat Muslim sendiri, karena mereka memiliki penafsiran yang berbeda mengenai al-Qur'an dan Sunnah, dan juga selalu memakai pertimbangan kebangsaan. Jika terjadi konflik antara Islam dan kebangsaan, pada umumnya yang dipilih adalah paham kebangsaan. Karena itu, penerapan syariat Islam selalu disesuaikan dengan kondisi dan sejarah masing-masing bangsa. Berdasarkan realitas yang ada sekarang, maka sebuah khilafah Islam sebagaimana dicita-citakan oleh Hizbut Tahrir adalah hal yang mustahil sehingga hanya merupakan ilusi belaka. Karena itu, formasi jaringan dunia Islam yang paling mungkin direalisasikan secara maksimal hanyalah model OIC/OKI.

Dalam model OIC/OKI tersebut, setiap negara yang jumlahnya sekitar 55 negara itu masih tetap memiliki kedaulatan masing-masing. OKI tidak punya hak untuk melakukan intervensi, baik di bidang politik, ekonomi, kebudayaan maupun keagamaan, walaupun OKI punya organ khusus untuk mengembangkan hukum syari'ah. Organisasi supra-nasional ini cukup menjalankan fungsi koordinasi dan memfasilitasi kerjasama antar negara-negara Islam di bidang-bidang yang telah diprogramkan secara bersama. Selain itu, organisasi ini juga bisa berperan sebagai forum untuk membangun solidaritas, misalnya dalam perjuangan rakyat Palestina memperoleh kembali hak-haknya. Di berbagai bidang, organ khusus seperti IDB bisa memberikan bantuan keuangan berupa pinjaman internasional untuk dana pembangunan atau berpartisipasi memperkuat permodalan bank-bank syari'ah sebagaimana telah diberikan oleh IDB terhadap BMI di Indonesia.

Berbagai lembaga ilmu pengetahuan dan riset bisa pula membantu pengembangan konsep-konsep. Tapi yang menjadi masalah adalah landasan epistemologinya yang tidak memungkinkan negara-negara Islam mengembangkan bidang-bidang ilmu pengetahuan sebagaimana dilakukan oleh UN University. Bahkan

tokoh pemikir besar semacam Hassan Hanafi harus bekerja sama dengan UN University, terutama ketika Dr. Sudjatmoko dari Indonesia masih menjabat Rektor. Ketika itu, Hassan Hanafi juga sering berkunjung dan berdiskusi di Indonesia. Karena kurang berfungsinya sistem kelembagaan OIC/OKI, maka timbul berbagai inisiatif dari luar misalnya dengan lahirnya *The International Institute of Islamic Thoughts* (IIIT) atau *International Institute for Islamic Thought and Civilization* (ISTAC) yang berpusat di Kuala Lumpur. IIIT ini juga punya cabang atau perwakilan di 16 negara di dunia.

Namun kenyataannya, lembaga-lembaga itu tidak cukup memberikan kebebasan dan keberanian bersikap kritis terhadap ortodoksi. Hal ini disebabkan karena lembaga-lembaga ini masih terikat dengan pembiayaan atau perlindungan politik dari negara-negara Islam yang masih memegang ortodoksi. Inilah yang menyebabkan timbulnya intelektual-intelektual pemberontak semacam Hassan Hanafi atau Asghar Ali Engineer dengan karya-karya intelektual individual. Mereka harus menempuh langkah tersebut meskipun dengan segala konsekuensi pahit yang menyertainya, yaitu mengalami pengasingan seperti yang dialami oleh Fazlur Rahman dan Nashr Hamid Abu Zaid yang dianggap menyeleweng dari paham ortodoksi. Umat Islam memang menyesuaikan diri dengan rezim ortodoksi dunia Islam. Ini berarti tidak terjadi pencerahan. Karena itu, gerakan intelektual memerlukan *critical mass*. Inilah yang disadari di Indonesia, sehingga lahir gerakan pengkaderan sebagaimana dilakukan oleh Paramadina, P3M, JIL, JIMM, PSAP dan LSAF. Yang terakhir ini misalnya melaksanakan program pembentukan kader intelektual dalam jaringan Islam kampus yang berhaluan liberal dan pluralis.

Di seluruh dunia Islam, barangkali gerakan Islam yang bersifat liberal punya harapan besar di dua atau tiga negara saja, yaitu Turki, Indonesia dan mungkin Pakistan. Menurut Gus Dur, gerakan Islam yang sekuler, pluralis dan liberal lebih maju di Indonesia daripada di Turki, sebab di Indonesia gerakan ini timbul dari bawah atas dasar kesadaran masyarakat sendiri. Sekarang liberalisasi dan sekularisasi di Turki umpamanya, lebih banyak dipaksakan dari atas, terutama oleh elite militer. Demokrasi juga lebih alamiah di Indonesia

ketimbang di manapun juga di dunia Islam. Dalam konteks Indonesia ini, terdapat tiga model kebangkitan. Pertama adalah kebangkitan intelektual. Kedua adalah gerakan perubahan sosial, misalnya dalam bentuk gerakan kesetaraan gender dan lingkungan hidup yang dimobilisasi oleh aktivis-aktivis yang berlatar belakang Islam. Dan ketiga adalah pengembangan ekonomi, khususnya keuangan syari'ah yang bisa meluas ke sektor riil.

Gejala lain yang menarik adalah bahwa di Indonesia telah terjadi konvergensi antara gerakan Islam dan kebangsaan, dipelopori oleh umpamanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berlatar belakang Nahdlatul Ulama (NU) di bawah arahan Gus Dur. Namun begitu, PKB dan gerakan Islam liberal masih harus bersaing dengan kelompok fundamentalis yang juga mengalami kemajuan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang didukung oleh lapisan terpelajar yang dinamis, militan dan bersemangat tinggi, mengikuti pola Ikhwanul Muslimin. Selain itu, di Indonesia juga terdapat gerakan Islam fundamentalis semacam Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin Indonesia, bahkan kelompok teroris yang berjaringan internasional. Di Indonesia juga terdapat gerakan dakwah yang didukung oleh korps mubalig yang mendapat pendanaan dari Saudi Arabia.

Dalam persaingan wacana itu, mereka juga memiliki sejumlah penerbitan, bahkan didukung oleh penerbitan dari Muhammadiyah, Pesantren Hidayatullah dan koran Republika yang mempropagandakan syariat Islam. Lebih dari itu, mereka juga memanfaatkan teknologi tinggi dengan membuat situs internet, antara lain website yang memuat berita dan pemikiran. Dalam gerakan penerapan syariat itu, mereka kini memasuki forum demokrasi baik dalam pembuatan UU tingkat nasional maupun peraturan-peraturan daerah yang dikenal dengan nama Perda Syariat itu dengan cara menyusup ke partai-partai lain, misalnya Golkar, PPP dan PBB. Strategi ini sebenarnya mengandung dilema tersendiri bagi gerakan Islam, khususnya parpol Islam, sebab jika perjuangan syariat Islam lebih efektif melalui partai sekuler, mengapa sistem partai Islam masih dipertahankan? Karena itu, gerakan Islam memakai strategi ganda. Di satu pihak memanfaatkan partai-partai

sekuler yang harus dibayar dengan dukungan terhadap kader partai lain dalam pemilihan daerah atau pemilihan umum. Tapi mereka juga masih mengembangkan partai dengan identitas Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera, PPP, PBB atau PBR.

Banyaknya partai-partai Islam itu menunjukkan ketidak-mampuan gerakan politik Islam mencapai persatuan. Hal ini tentu memberikan sumbangan terhadap ketidak-mampuan gerakan Islam membentuk kesatuan bangsa. Perpecahan ini sebenarnya merupakan gejala lama sejak masa Khulafa Rasyidin. Pada dasarnya, perpecahan itu bersumber dari kepemimpinan. Tidak ada satu dua pemimpin yang cukup berwibawa sehingga didukung oleh mayoritas. Jika di antara partai-partai Islam sendiri tidak ada persatuan, bagaimana sebuah khilafah internasional hendak dibentuk? Bagaimana khilafah Islam bisa menunjuk seorang pemimpin yang didukung dan ditaati? Dari kondisi kepartaian itu, maka terpilihnya seorang kader gerakan Islam, Yusuf Kalla sebagai Wakil Presiden pada pilpres 2004 adalah suatu pretasi. Tapi, tokoh ini terpilih melalui dukungan sebuah partai sekuler, yaitu Golkar, dan bukan karena dukungan partai-partai Islam. Sedangkan M. Amin Rais yang mendapat dukungan sebuah partai yang berlatar belakang ormas besar Islam, tidak berhasil meraih dukungan dalam putaran pertama pemilihan umum. Karena itu, partai Islam harus bersatu menjadi partai terbuka. Langkah yang dilakukan oleh PKB dan PAN sudah benar, namun belum benar-benar berhasil menjadi partai terbuka. Unsur primordialisme dan sektarianismenya masih cukup kental mewarnai citra partai. Dengan demikian, maka kebangkitan Islam di bidang politik hanya bisa terjadi dengan kebangsaan. Partai Islam harus menjadi sebuah partai kebangsaan dan pluralis.

Untuk sementara dapat ditarik kesimpulan, bahwa kebangkitan Islam hanya bisa terjadi dalam kerangka kebangkitan suatu bangsa Muslim seperti Indonesia. Di Indonesia, kebangkitan Islam bisa terjadi dalam naungan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebenarnya strategi seperti ini sudah dilakukan oleh gerakan politik Islam di beberapa negara. Karena itu, maka yang perlu disusun adalah model yang ideal bagi gerakan Islam di suatu negara bangsa tertentu. Dunia

Islam dewasa ini telah melahirkan beberapa gerakan yang punya potensi menjadi model ideal. Pertama adalah model Ikhwanul Muslimin di Mesir. Tapi di masa lalu, Ikhwanul Muslimin mengalami sempalan menjadi gerakan yang terlibat dalam penggunaan kekerasan, walaupun gagasan inti dari organisasi ini menolak penggunaan kekerasan. Ikhwanul Muslimin juga masih merupakan sebuah partai yang tertutup dan ideologis, yakni masih menganut paham Islamisme yang sektarian dan fundamentalis. Namun, pola perjuangan seperti itu telah mengalami perubahan. *Pertama*, berkembang menjadi partai kader berbasis profesionalisme untuk bisa menduduki jabatan-jabatan politik terutama di parlemen. *Kedua*, partai sendiri memusatkan perhatian di bidang ekonomi dengan mengembangkan unit-unit usaha untuk mendukung kemandirian partai. Di Indonesia, model ini diikuti oleh PKS yang mengembangkan sebuah partai yang berkarakter. Di sekitar Ibu Kota, partai ini ternyata berhasil meraih kemenangan – walaupun dalam Pilkada DKI terakhir kader PKS gagal menarik suara terbanyak, karena yang berhasil adalah tokoh birokrat yang mendapat dukungan dari berbagai partai lain termasuk partai Islam. Namun demikian, PKS pada dasarnya masih merupakan sebuah partai tertutup; rekrutmen anggota dilakukan melalui seleksi keanggotaan yang ketat berdasarkan kriteria syariat. Selain itu, partai ini masih memiliki agenda pelaksanaan syariat dalam semua lapisan kehidupan, mengikuti orientasi Masyumi dan gerakan fundamentalis Islam atau Islamisme pada umumnya.

Model kedua adalah Jami'at al-Islami yang didirikan oleh Abu A'la al-Maududi di Pakistan. Model ini, di satu pihak, mengembangkan dan mempropagandakan model kepemimpinan Khulafa Rasyidah. Tetapi di lain pihak, gerakan ini memilih cara-cara demokrasi guna mencapai tujuan secara gradual dan tidak revolusioner. Walaupun memilih jalur demokrasi, tetapi Jami'at al-Islami ini masih merupakan partai tertutup dengan dukungan kaum Muslim minoritas. Partai ini juga bukan sebuah partai sekuler berhaluan kebangsaan dan karena itu merupakan partai eksklusif.

Model ketiga adalah Front Keselamatan Islam (FIS) di Aljazair. Partai ini juga berhaluan Islamisme, tetapi mengikuti cara demokrasi

dalam perjuangan politiknya. Namun, meskipun berhasil dan meraih suara terbanyak dalam Pemilu, partai ini dibubarkan oleh golongan militer yang sekuler, sehingga partai ini mengalami kegagalan. Partai ini akan maju hanya jika mampu mengubah dirinya sebagai sebuah partai terbuka dan menerima prinsip sekularisme dan asas kebangsaan sehingga tidak menimbulkan reaksi dari kaum militer yang berkuasa dan berpengaruh. Ironisnya, tindakan yang melanggar demokrasi ini ternyata tidak mendapat reaksi pembelaan dari negara-negara Islam lain, termasuk di Arab sendiri, karena kaum militer ini mengatas-namakan nasionalisme Arab.

Model keempat adalah partai AK atau *Justice and Development Party* yang berkembang di Turki. Partai ini tidak secara terbuka menganut ideologi Islamisme dan lebih merupakan representasi aspirasi kaum Muslim di Turki yang merupakan 96% dari jumlah penduduk. Strategi yang dipakai oleh partai berhaluan Islam ini adalah: *pertama*, menerima dan mengikuti sekularisme dengan usaha melunakannya; *kedua*, mengikuti cara demokrasi parlementer sebagaimana berlaku di Turki; *ketiga*, mendukung masuknya Turki ke dalam Uni Eropa; dan *keempat*, mengikuti haluan pasar bebas dalam politik perekonomian, sebab melalui pasar bebas inilah umat Islam bisa membangun kekuatan ekonominya. Model ini ternyata sangat sukses. Ia berhasil membangun kekuatan ekonomi dan proses industrialisasi di Turki. Dengan keberhasilannya ini, partai AK mampu meraih suara terbanyak dalam parlemen Turki, sehingga presiden maupun perdana menteri Republik Turki dewasa ini dijabat oleh tokoh Islam AK.

Model lain yang bisa menjadi perhatian adalah Malaysia. Model ini merupakan kombinasi dua strategi. Di satu pihak, gerakan politik Islam diwakili oleh partai Islam fundamentalis yang berjuang secara demokratis – terutama di dua negara bagian – yaitu PAS. Di lain pihak, adalah melalui federasi partai sekuler pluralis dan terbuka, yaitu AMNO dan Partai Keadilan yang melakukan oposisi. Kekuatan partai ini lebih merupakan representasi aspirasi kaum Muslim Melayu daripada Islamisme. Karena itu, maka partai ini berperan dalam meningkatkan pendapatan kaum Muslim, terutama

petaninya, dan mendukung perkembangan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syari'ah sebagai wahana pembangunan ekonomi negara. Keistimewaan model Malaysia ini mirip dengan di Turki, yaitu berhasil dalam melaksanakan kebangkitan ekonomi atau kebangkitan Islam melalui pembangunan ekonomi. Model ini sebenarnya mirip dengan model Indonesia. Walaupun gerakan politik Islam belum berhasil mensukseskan pembangunan ekonomi, tetapi nampak memperlihatkan keberhasilannya dalam pengembangan ekonomi syari'ah – melalui pasar bebas – dan demokrasi parlementer.

Pembangunan ekonomi Islam dalam kerangka pasar bebas ini telah berhasil dikembangkan di Saudi Arabia dan Negara Emirat Arab yang kecil-kecil berkat dukungan sumber daya alam migas yang kaya dan hubungan kerjasama dengan negara-negara industri maju. Negara-negara kaya minyak lain seperti Irak dan Aljazair belum menampakkan keberhasilannya, dan masih mengikuti skema ekonomi sosialis. Negara seperti Irak juga tidak berhasil karena masih terlalu banyak menggunakan dananya untuk membangun kekuatan militer melawan Israel. Sebenarnya kunci kebangkitan negara-negara Arab dan Timur Tengah pada umumnya adalah jika mencapai perdamaian abadi dengan Israel. Yang paling ideal adalah jika negara Palestina dan Israel bisa bergabung menjadi sebuah negara sekuler pluralis di mana para pemeluk tiga agama terbesar yaitu Islam, Kristen dan Yahudi dapat hidup berdampingan secara damai dan persaingan dilakukan melalui mekanisme demokrasi liberal. Jika perdamaian abadi dapat dicapai, maka negara-negara Islam Timur Tengah bisa mengkonsentrasikan diri dalam pembangunan ekonomi dan melakukan kerjasama di segala bidang melalui OIC/OKI yang merupakan lembaga khilafah Islam. Dalam kebangkitan ini, konfrontasi terhadap dunia Barat harus dilepaskan dan diubah menjadi mitra pembangunan. Negara Barat penting untuk dijadikan mitra dalam pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui cara inilah berbagai negara Islam akan berkembang menjadi negara-negara industri baru mengikuti rekan-rekan mereka di Timur Jauh.

Peranan merintis perdamaian Arab-Israel ini sebenarnya telah dilakukan oleh Mesir melalui kesepakatan Camp David. Tetapi, inisiatif Mesir ini tidak disetujui oleh negara-negara Arab lain. Bahkan politik perdamaian ini sudah ditempuh pula oleh Yasser Arafat, melalui organisasi Fatah yang berhaluan sekuler. Tapi justru Fatah ini dalam Pemilu di Palestina dikalahkan oleh partai Hamas yang berhaluan keras. Indonesia pada zaman pemerintahan Abdurrahman Wahid juga mencoba merintis upaya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, tapi langkah ini ditentang keras oleh masyarakat Indonesia. Padahal, hubungan diplomatik ini sangat memungkinkan bagi Indonesia untuk melaksanakan politik bebas aktif dan bisa menjadi mediator Arab-Israel dalam mencapai perdamaian. Dalam peranan ini, organisasi Asia-Afrika bisa merupakan dukungan ke arah perdamaian Arab-Israel. Dengan ganjalan masalah Palestina ini, dunia Islam harus berkonfrontasi dengan negara-negara Barat. Inilah hambatan utama kebangkitan dunia Islam, sebab dalam posisi politik seperti itu, Dunia Barat tidak akan memberi kesempatan kepada dunia Islam untuk bangkit. Karena hubungan dengan Barat yang konfrontatif inilah, apalagi diperkuat oleh *Clash of Civilization*-nya Huntington, maka dunia Islam akan dianggap sebagai musuh Barat. Padahal, kebangkitan dunia Islam ini bergantung kepada kemitraan dan dialog peradaban antar Barat dan Islam. Di samping itu, dengan selesainya masalah Arab-Israel, maka dunia Islam bisa terhindar dari anggaran perang, sehingga bisa mengkonsentrasikan dirinya untuk membangun ekonomi dan demokrasi.

Dengan demikian, agenda kebangkitan Islam dewasa ini menghadapi jalan buntu. Tetapi harapan kebangkitan ini masih ada, yaitu melalui kebangkitan bangsa-bangsa Muslim. Misalnya jalan menuju kebangkitan ini telah ditempuh oleh Malaysia yang tak lama lagi bisa berstatus menjadi negara industri baru dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional dan demokratis. Indonesia sendiri bisa mengikuti langkah Malaysia ini, tetapi dalam rangka kebangkitan ASEAN secara keseluruhan. Namun kebangkitan Malaysia itu tetap tidak bisa berperan untuk

memecahkan masalah Arab-Israel, sebab Islam di Malaysia cukup fundamentalis dan cenderung mengikuti model Saudi Arabia. Jika Indonesia berhasil bangkit, maka Indonesia mempunyai posisi dan dukungan internasional untuk mencapai perdamaian Timur Tengah. Bagaimanapun juga, perdamaian Timur Tengah merupakan kunci kebangkitan dunia Islam. Masalahnya adalah Indonesia harus bisa menemukan model kebangkitan Islam itu. Partai-partai Islam di Indonesia nampaknya juga mempunyai masalah tersendiri untuk menjadi kekuatan politik yang bersatu dan berhaluan moderat.

Sebuah model kebangkitan bisa dilakukan oleh Indonesia dengan mengadopsi berbagai unsur yang tepat dari berbagai model yang telah ditempuh di berbagai dunia Islam. *Pertama*, menerima sekularisme seperti di Turki. *Kedua*, menempuh perubahan secara demokratis dengan menghindari penggunaan cara-cara kekerasan sebagaimana ditempuh oleh Jami'at al-Islam Pakistan yang didirikan Abu A'la al-Maududi. *Ketiga*, memakai kerangka kebangsaan yang pluralis seperti ditempuh oleh PKB di Indonesia. *Keempat*, menerima sistem pasar bebas seperti ditempuh oleh partai AK di Turki tapi tetap bersikap antipati terhadap imperialisme dan Neo-liberalisme seperti Hugo Chavez dari Columbia dan Moralez dari Bolivia. *Kelima*, berdamai dengan negara-negara industri maju, seperti kerjasama Turki dengan negara-negara Eropa. *Keenam*, bersikap bebas aktif dalam sengketa Arab-Israel agar bisa menjadi mediator bagi perdamaian abadi di Timur Tengah. *Ketujuh*, membangun partai kader yang berkarakter seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir, tetapi berideologi sekuler, misalnya sosial demokrasi, seperti Partai Buruh di Inggris atau Partai Sosial-Demokrat di Jerman. ❖

M. Dawam Rahadjo adalah Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF), Jakarta. Ia adalah salah seorang sendekiawan Muslim yang gigih membela kebebasan beragama di Indonesia.